

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, LEADERSHIP, AND POLITICAL COMMUNICATION: A ONE-YEAR PERFORMANCE REVIEW OF THE MERAH PUTIH CABINET

KOMUNIKASI ORGANISASI, KEPEMIMPINAN, DAN KOMUNIKASI POLITIK: SATU TAHUN KINERJA KABINET MERAH PUTIH

¹Ilham Riyadi

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

E-mail: ilhamriyadi@unismuh.ac.id

“081242298502”

Abstract

This study aims to analyze the interrelation between bureaucratic communication systems, leadership styles, and the effectiveness of government political communication during the first year of the Merah Putih Cabinet. Using a qualitative approach and a literature review method, this research draws upon previous studies, national research institute reports, and official government data. The analysis is conducted through thematic and interpretive comparison of organizational communication theories and political communication theories. The findings indicate that although the Prabowo–Gibran administration has succeeded in maintaining political stability and achieving positive economic growth, communication effectiveness across government institutions and consistency in public messaging remain significant challenges. Communication incongruence between ministries reflects weak horizontal bureaucratic coordination. From a political communication perspective, frequent spontaneous and controversial public statements by key government officials—including the President—have not strengthened public trust; instead, they reveal issues of insensitivity and highlight hierarchical power dynamics in policy-making. In summary, this article identifies five key communication issues in the Merah Putih Cabinet: misaligned government agenda setting, technocratic communication delivered out of context, echo chamber tendencies leading to tone-deaf messaging, reliance on the magic bullet paradigm viewing the public as passive recipients, and concerns regarding transparency and credibility of officials. Therefore, it is essential for the government to strengthen a national communication strategy that fosters two-way communication between the state and the public.

Keywords: organizational communication, political communication, performance, Merah Putih Cabinet

Abstrak

Kajian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara sistem komunikasi birokrasi, gaya kepemimpinan, dan efektivitas komunikasi politik pemerintah pada tahun pertama Kabinet Merah Putih. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari penelitian terdahulu dan laporan lembaga riset nasional dan data resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan membandingkan teori komunikasi organisasi dan teori komunikasi politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil mempertahankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang positif, efektivitas komunikasi antar lembaga dan konsistensi pesan publik masih menjadi tantangan utama. Ketidaksinkronan komunikasi antar Kementerian menunjukkan lemahnya koordinasi horizontal birokrasi. Di sisi lain, dalam pandangan komunikasi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

politik, banyaknya pernyataan *blunder* dan spontan yang disampaikan oleh terutama pembantu-pembantu presiden bahkan presiden sendiri alih-alih meninggalkan kesan yang baik bagi publik, sebaliknya, malah menunjukkan ketidakpekaan dan relasi kuasa yang tajam dalam pengambilan kebijakan yang bersifat hirarkis. Sederhananya, jurnal ini merangkum lima poin utama terkait komunikasi politik Kabinet Merah Putih mulai dari agenda setting pemerintah yang kurang tepat, komunikasi teknokratik yang salah konteks, tendensi echo chamber yang menyebabkan *tone deaf*, *magic bullet theory* yang melihat masyarakat sebagai pihak yang pasif, dan transparansi serta kredibilitas pejabat yang dipertanyakan. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi nasional yang mendorong komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: komunikasi organisasi, komunikasi politik, kinerja, kabinet merah putih

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Komunikasi adalah urat nadi dari setiap organisasi, seperti halnya dalam konteks pemerintahan, komunikasi menjadi instrumen utama dalam menggerakkan roda birokrasi, membangun legitimasi politik, serta menjaga kepercayaan publik. Sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa cepat mengambil keputusan, tetapi juga seberapa efektif mengomunikasikan keputusan tersebut kepada publik dan memastikan bahwa setiap elemen birokrasi memahami serta menjalankannya dengan konsisten. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berlapis dan majemuk, komunikasi organisasi menjadi fondasi utama bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik (Sugiarto, 2025). Sebab komunikasi organisasi merupakan salah satu dimensi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik (Addawiyah Addawiyah et al., 2025).

Komunikasi organisasi merupakan proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam konteks organisasi dengan tujuan mencapai koordinasi dan tujuan bersama. Artinya, komunikasi tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi menciptakan makna bersama yang memungkinkan individu dan unit organisasi bertindak secara selaras (Hatala & Lutta, 2009). Dalam pemerintahan, makna bersama ini sangat penting karena setiap kebijakan yang dihasilkan di tingkat pusat hanya akan efektif apabila diterjemahkan dengan pemahaman yang sama oleh seluruh elemen birokrasi, dari kementerian hingga unit pelaksana di daerah.

Namun, kenyataannya, fakta bahwa Indonesia memiliki birokrasi yang berlapis-lapis menjadikan sistem komunikasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural (Tumanggor & Kholid, 2025). Budaya hierarkis yang kuat sering kali membuat komunikasi bersifat satu arah, dari atas ke bawah, tanpa ruang yang cukup bagi umpan balik. Pola ini menciptakan “komunikasi komando” yang menekankan kepatuhan, bukan partisipasi (Kusuma et al., 2024). Padahal, efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh anggota organisasi, terutama pada era pemerintahan terbuka yang menuntut kolaborasi dan transparansi.

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika komunikasi antar lembaga dalam pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, ego sektoral sangat kuat. Setiap kementerian memiliki struktur, budaya organisasi, dan gaya komunikasi yang berbeda, sering kali menghasilkan perbedaan persepsi dalam menafsirkan kebijakan (Wahyunto, 2025).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bersifat nasional justru ditafsirkan berbeda antar lembaga. Fenomena ini terlihat jelas pada awal tahun 2025 ketika terjadi perbedaan narasi antara data BI, pada September 2025, di mana dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai Rp 233,97 triliun. Sementara berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan dana pemerintah daerah di bank sampai akhir September 2025 adalah Rp 215 triliun(Yudi, 2025).

Tantangan komunikasi birokrasi ini semakin terasa dalam konteks pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintahan ini menandai era baru kolaborasi antara figur politik senior (Prabowo Subianto) dan generasi muda (Gibran Rakabuming Raka), yang masing-masing membawa gaya komunikasi berbeda. Prabowo dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas, [berapa apiberapi-api](#) dan spontan, sedangkan Gibran menonjol dengan gaya tenang dan santai, terutama di ruang digital. Sinergi dua gaya ini menciptakan peluang besar untuk memperkuat komunikasi organisasi pemerintahan, namun juga menghadirkan risiko fragmentasi bila tidak didukung oleh sistem komunikasi birokrasi yang solid. Dan dalam setahun terakhir, ini menjadi tantangan terbesar di Kabinet saat ini.

Dalam satu tahun pertama pemerintahannya, Kabinet Merah Putih menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Berdasarkan data dari beberapa Lembaga Survei (Detik, 2025; Safitri, 2025) mencatat bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet cukup tinggi meski penyampaiannya ke publik belum optimal. Bahkan Celios (2025)- sebuah lembaga riset lainnya memberi rapor merah bagi Kinerja Setahun Presiden Prabowo, di mana komunikasi kebijakan dinilai mayoritas responden buruk.

Ketidakefektifan komunikasi politik sering kali bersumber dari kelemahan komunikasi internal birokrasi. Menurut Grunig et al. (2013), komunikasi yang tidak simetris (satu arah dari atas ke bawah) cenderung menghasilkan miskomunikasi dan resistensi di tingkat pelaksana. Sebaliknya, komunikasi dua arah (simetris) memungkinkan terjadinya dialog dan kolaborasi, di mana bawahan dapat memberikan umpan balik atas kebijakan yang dijalankan. Model komunikasi dua arah inilah yang masih lemah di banyak lembaga pemerintahan Indonesia.

Selain itu, era digital membawa dimensi baru dalam komunikasi pemerintahan. Program *Satu Data Indonesia* dan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* digagas untuk memperkuat komunikasi lintas lembaga berbasis data terintegrasi (KemenpanRB, 2021). Meski inovasi ini telah dilakukan sebelum Pemerintahan Prabowo, namun berhasil dalam arti terjadi peningkatan, meski belum signifikan sebab hasil Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Sehingga menurut Suryana, T. F., Rahmawati, A. A., Ramdanti, N. S., & Safitri (2025), masih banyak komunikasi antar lembaga yang bersifat manual dan sektoral, yang memperlambat pengambilan keputusan.

Lebih jauh lagi, komunikasi politik pemerintah juga menghadapi tantangan di era keterbukaan informasi. Masyarakat kini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif dalam membentuk opini publik melalui media sosial. Dalam situasi seperti ini, konsistensi pesan pemerintah menjadi krusial (Rodrigues, 2023). Ketidaksinkronan pesan antar pejabat dapat langsung menjadi sorotan publik dan memengaruhi legitimasi pemerintah.

[Meski Kabinet Merah Putih banyak disorot, baik oleh akademisi dan pengamat politik, termasuk oleh media berbentuk opini dan publikasi Lembaga Masyarakat \(LSM\). Namun, tulisan ilmiah yang secara detail menganalisa mengenai kaitan antara komunikasi organisasi](#)



dalam hal ini Kabinet Merah Putih, Kepemimpinan dan sekaligus Komunikasi Politik masih terbatas. Adapun beberapa tulisan yang sudah diterbitkan sebelumnya mengenai Prabowo tidak secara langsung mengaitkan antara komunikasi organisasi dan komunikasi politik secara bersama ([lihat Anindita et al., 2025; Diqqi et al., 2025; Maulana & Harjono, 2024; Riyadi, 2025; Umam & Harijono, 2025](#)). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik dalam memperkaya teori komunikasi organisasi di sektor publik, tetapi juga nilai praktis dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem komunikasi pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks Kabinet Merah Putih, komunikasi organisasi yang kuat, kepemimpinan yang komunikatif, dan komunikasi politik yang transparan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ke depan. [Dengan kata lain, kebaharuan penelitian ini ada pada kemampuannya dalam menghubungkan komunikasi internal kabinet dengan perspektif publik.](#)

METODE (METHODS)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka atau *literature review* yang bersifat analitis dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengujian hipotesis empiris, melainkan pada pembentukan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai hubungan antara komunikasi organisasi, komunikasi politik, dan efektivitas kinerja pemerintahan dalam konteks satu tahun pertama Kabinet Merah Putih (Oktober 2024–Oktober 2025). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena komunikasi pemerintahan sebagai suatu sistem sosial yang kompleks, di mana makna dan koordinasi dibangun melalui proses interaksi dan pertukaran pesan di berbagai tingkat birokrasi dan ruang publik.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan literatur dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi kata kunci seperti “komunikasi organisasi pemerintahan”, “komunikasi politik”, “koordinasi antar kementerian”, dan “Kabinet Merah Putih”. Selain literatur akademik, penelitian ini menggunakan laporan lembaga riset nasional seperti Celios, IndoStrategi, Poltracking, dan Katadata Insight Center, yang memberikan data tentang persepsi publik terhadap komunikasi pemerintah. Laporan-laporan ini memberikan dasar empiris bagi analisis mengenai efektivitas komunikasi lintas lembaga dan keterpaduan sistem informasi dalam pemerintahan. Penelitian ini juga menggunakan data yang berasal dari berita yang diakses secara terbuka namun dari kantor berita atau Perusahaan media nasional terpercaya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik dan interpretatif. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari literatur, seperti struktur komunikasi birokrasi, gaya kepemimpinan komunikatif, dan mekanisme komunikasi politik pemerintah. Tahapan analisis meliputi proses membaca dan menandai (*coding*) bagian literatur yang mengandung tema utama, mengelompokkan tema-tema yang sejenis, dan menafsirkan maknanya berdasarkan konteks pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun hubungan konseptual antara teori komunikasi organisasi klasik dan temuan empiris kontemporer. [Meski di sisi lain, penulis juga menyadari bahwa data yang diperoleh bukanlah bersumber dari data primer namun data sekunder.](#)



HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Temuan dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa komunikasi organisasi dan kepemimpinan memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas kinerja pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih. Komunikasi organisasi menjadi faktor penentu dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian dan membangun persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan. Secara konseptual, berdasar teori komunikasi organisasi memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan (Muhammad et al., 2019). Dalam sistem terbuka ini, komunikasi berfungsi sebagai “mekanisme homeostatis” yang menjaga keseimbangan antara tuntutan eksternal dan kapasitas internal organisasi (Amadasun, 2014). Dalam konteks pemerintahan Indonesia, sistem komunikasi birokrasi yang besar dan kompleks menghadapi dua tantangan utama: pertama, bagaimana memastikan kebijakan yang dirumuskan di tingkat elit diterjemahkan secara akurat di level implementasi; dan kedua, bagaimana mencegah distorsi pesan dalam rantai hierarki komunikasi.

Fenomena distorsi pesan terlihat dalam dinamika koordinasi antar kementerian. Laporan Indostrategi (Safitri, 2025) menunjukkan skor koordinasi lintas kementerian hanya mencapai 3,1 dari 5, lebih rendah dari rata-rata kinerja kebijakan yang berada di angka 3,5. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya mekanisme *horizontal communication*. Dalam struktur birokrasi Indonesia, komunikasi horizontal antar lembaga sering bergantung pada relasi personal atau *ad hoc meeting* antar pejabat, bukan sistem formal yang melembaga. Akibatnya, kebijakan strategis sering dijalankan secara sektoral tanpa sinkronisasi pesan publik.

Contoh nyata dapat dilihat dari perbedaan pendapat antarmenteri mengemuka pada isu penunjukan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani masalah di Papua sekaligus berkantor di sana (Media Indonesia, 2025). Ketidaksinkronan pesan tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat dan pelaku pasar. Kasus ini menunjukkan *message incongruence*, yaitu ketidaksesuaian makna antara unit organisasi dalam menyampaikan kebijakan publik.

Menurut Nurachmah (2022) gangguan semacam ini dapat dikategorikan sebagai *semantic noise* — gangguan makna yang muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap pesan kebijakan. Dalam konteks pemerintahan, gangguan ini biasanya bersumber dari dua hal: perbedaan persepsi antar pimpinan lembaga dan kurangnya mekanisme koordinasi informasi. Ketika kedua hal ini terjadi, efektivitas komunikasi organisasi menurun, berdampak pada kinerja kebijakan dan menurunkan kepercayaan publik.

Namun, di sisi lain, sejumlah kementerian menunjukkan praktik komunikasi organisasi yang kuat dan berorientasi kinerja. Kemkomdigi salah satu contoh telah berhasil mengintegrasikan lebih dari 240 layanan dari pemerintah pusat dan daerah melalui Portal Layanan Publik Nasional (PLPN). Program ini mengurangi waktu dan biaya untuk layanan administratif hingga 40 persen, serta memperkuat interoperabilitas data antarinstansi melalui sistem Digital Government Backbone (DGB) yang kini menghubungkan 1.200 lembaga pemerintah dengan aman dan terenkripsi (Sudoyo, 2025).



Keberhasilan kementerian ini sejalan dengan teori komunikasi organisasi modern dari Pace dan Faules (2020), yang menyebut bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuan menciptakan arus komunikasi yang efisien, terbuka, dan didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Dalam konteks birokrasi, hal ini berkorelasi langsung dengan peningkatan efisiensi kerja, pengambilan keputusan cepat, serta kejelasan arah kebijakan.

Sementara itu, Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian menunjukkan skor kinerja di bawah 3,8. Laporan Poltracking (2025) mengindikasikan bahwa dua kementerian tersebut sering menghadapi kesulitan dalam menyampaikan pesan kebijakan secara konsisten ke publik. Hal ini disebabkan oleh struktur komunikasi internal yang masih hierarkis dan lamban dalam mengadaptasi arahan pimpinan pusat. Model komunikasi satu arah (*top-down*) masih dominan, sementara ruang untuk umpan balik (*bottom-up*) relatif kecil. Dalam jangka panjang, pola seperti ini menciptakan budaya organisasi yang pasif dan kurang inovatif (Sendika & Frinaldi, 2025).

Kepemimpinan memiliki peran sentral dalam membentuk budaya komunikasi organisasi. Khan et al. (2022) menjelaskan bahwa pemimpin transformasional menggunakan komunikasi bukan sekadar untuk memberi perintah, tetapi untuk menginspirasi dan membangun visi bersama. Dalam konteks Kabinet Merah Putih, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan instruktif yang tegas dalam pengambilan keputusan strategis (Hunneman, 2025), tetapi membutuhkan dukungan kepemimpinan komunikatif di tingkat menengah agar instruksi dapat diinternalisasi secara efektif di birokrasi.

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran (Rizqi Nandadita Pamungkas et al., 2024) menampilkan gaya kepemimpinan yang lebih santai dan terbuka, terutama melalui media sosial dan kegiatan publik. Pendekatan ini menarik bagi generasi muda dan mencerminkan upaya membangun pemerintahan yang responsif. Namun, gaya komunikasi ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem birokrasi yang formal dan berjenjang. Gaya informal Gibran cocok untuk komunikasi eksternal, tetapi belum berpengaruh signifikan terhadap reformasi komunikasi internal birokrasi.

Belum efektifnya komunikasi pejabat bahkan bisa ditandai dari dua kali teguran Prabowo kepada bawahannya untuk memperbaiki komunikasi dengan publik sebagaimana yang diungkap Anggota DPR RI (Aulia, 2025). Data ini mengonfirmasi pentingnya konsistensi komunikasi lintas lembaga. Komunikasi yang efektif dalam organisasi besar menuntut adanya *strategic alignment*, yaitu keselarasan pesan dari puncak hingga unit terkecil organisasi (Rohillah & Sulistiana, 2025). Tanpa penyelarasan strategis ini, setiap unit cenderung membangun interpretasinya sendiri terhadap kebijakan yang sama, menciptakan *policy dissonance* — situasi di mana kebijakan yang tampak seragam ternyata diimplementasikan secara berbeda di lapangan (Mudjiyanto et al., 2022).

Menariknya, bahkan sejak awal Prabowo sudah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat komunikasi organisasi dalam internal kabinet Merah Putih. Hal ini misalnya tergambar dari retreat di Akademi Militer Magelang (BPMI Setpres, 2024). Ini merupakan indikasi kesadaran Prabowo terhadap pentingnya komunikasi internal. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh sejauh mana kegiatan internal seperti itu diterjemahkan ke dalam praktik komunikasi di masing-masing lembaga.



Berdasarkan komunikasi organisasi tidak cukup diukur dari frekuensi interaksi, tetapi dari *sensemaking process* — kemampuan organisasi membangun makna kolektif dari informasi yang diterima (Maitlis & Christianson, 2014). Dalam konteks Kabinet Merah Putih, sidang kabinet yang intensif adalah langkah awal, tetapi maknanya akan lebih nyata jika setiap kementerian memiliki mekanisme sendiri untuk menafsirkan, mengomunikasikan, dan menindaklanjuti keputusan pusat secara efektif.

Sedangkan menurut analisis Teori Komunikasi Politik, ada beberapa penyebab dari kekacauan yang terjadi di media terkait dengan Pemerintahan Prabowo dalam setahun terakhir. Pertama, dalam Teori Agenda Setting(Bali & Halpin, 2021), pemerintah secara efektif mengendalikan atau mengelola isu-isu mana yang mendapatkan perhatian. Kegagalan dalam komunikasi politik pemerintah di bawah Kabinet Merah Putih seringkali muncul ketika politisi mengedepankan isu-isu teknis yang tidak dianggap penting oleh publik dalam kehidupan sehari-hari mereka, sementara masalah-masalah pokok (seperti taraf ekonomi, lapangan pekerjaan, akses layanan kesehatan) yang sudah menjadi agenda utama publik diabaikan. Publik akan cenderung mengabaikan pesan-pesan yang tidak sejalan dengan prioritas mereka. Misalnya, alih-alih turut berduka atau berupaya bertanggung jawab akan kematian bocah di Jawa Barat akibat cacingan, beberapa Menteri malah memberi pernyataan-pernyataan yang denial terkait dengan kasus tersebut. Salah satunya Menteri Kesehatan Budi Sadikin yang mengatakan cacingan tidak menyebabkan kematian(CNN Indonesia, 2025).

Kedua, berdasarkan Teori Komunikasi Teknokratik(McKenna et al., 2000) cara informasi disampaikan sangat mempengaruhi interpretasinya. Politisi Indonesia sering menggunakan bahasa yang abstrak, jargon, atau terlalu akademis yang membuat warga biasa merasa tersinggung. Mereka tidak mampu "membingkai" kebijakan yang kompleks dalam istilah yang sederhana dan mudah dipahami yang berhubungan dengan nilai-nilai dan pengalaman masyarakat, yang menyebabkan salah tafsir atau apatisme (Toha, 2024). Ini juga terkait dengan cara penyampaian pejabat yang seharusnya lebih peka dengan konteks. Sering kali bahasa pejabat di bawah kepemimpinan Prabowo tampak dikeluarkan secara emosional. Misal bagaimana Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan malah berseloroh ketika wartawan menanyakan perihal respon pemerintah terhadap paket kepala babi yang dikirim ke salah satu kantor berita(Hakim, 2025). Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahwa pejabat harus menggunakan bahasa yang santun (Rifandi, 2025).

Ketiga, berdasarkan Teori Echo Chamber (Dubois & Blank, 2018), orang-orang yang memiliki minat atau pandangan yang sama berinteraksi terutama di dalam kelompok mereka. Mereka mencari dan membagikan informasi yang sesuai dengan norma kelompok mereka dan cenderung memperkuat keyakinan yang sudah ada, ini misalnya terjadi ketika pejabat mungkin menggunakan ruang gema atau polling internal yang tidak mencerminkan dengan tepat suasana publik yang lebih luas. Dalam hal ini, Presiden Prabowo seringkali dicap tidak memahami konteks riil di lapangan sebab pola komunikasi yang dibangun oleh para politisi dan pejabat di sekitarnya cenderung bersifat satu arah dan terbatas. Sebagai contoh, hanya ada beberapa orang ‘dekat’ Prabowo termasuk Mayor Teddy yang menjadi penghubung yang sangat sentra dalam upaya pihak lain (di luar Presiden) untuk menyampaikan pendapat atau informasi. Orang-orang ini memiliki latar militer dan masih muda di banding Prabowo di mana para loyalis muda



cenderung mendukung agenda dan pandangan politik presiden tanpa memberikan masukan yang berarti (Syechbubakr, 2025). Sehingga, Prabowo sulit mendapatkan informasi yang utuh dan beragam. Konsekuensinya adalah ketika pesan seorang politisi dianggap tidak sejalan dengan "opini mayoritas", menurut Teori Spiral Keheningan, hal ini malah menciptakan ilusi penolakan yang luas dan semakin menjauhkan politisi dari masyarakat.

Keempat, berdasarkan *magic bullet theory* (König, 2021), jeleknya komunikasi politik pemerintah juga disebabkan karena para politisi menganggap publik sebagai penerima informasi yang pasif, bukannya sebagai konsumen aktif yang memiliki kebutuhan tertentu(Meffert et al., 2006). Transformasi birokrasi digital tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma organisasi(Ferdiansyah & Aini, 2025). Artinya, komunikasi organisasi di era digital bukan hanya tentang percepatan penyampaian informasi, melainkan tentang kolaborasi berbasis data. Di sinilah tantangan besar Kabinet Merah Putih: bagaimana memastikan bahwa regulasi dan birokrasi tidak bermasalah sehingga teknologi komunikasi digital tidak hanya menjadi proyek administratif, tetapi juga sarana membangun koordinasi lintas lembaga (Katharina, 2021).

Idealnya, Internet berpotensi untuk memperkuat ikatan antara politisi dan masyarakat dalam kerangka model representasi langsung(Ariel & Elishar, 2025). Namun ini juga sering kali tidak efektif. Meski sudah banyak politisi dan pejabat yang menggunakan sosial media karena internet dianggap menjadi media komunikasi yang efisien, namun pejabat yang kebanyakan adalah generasi Baby Boomers dan X, tidak memahami bahwa sosial media bisa menjadi senjata bermata dua, di satu sisi menjadi alat kampanye untuk memperkuat dukungan publik namun bisa juga melemahkan imej mereka. Ini dapat dilihat dari viralnya beberapa pernyataan menteri di bawah kepemimpinan Prabowo yang dipotong dan tersebar luas di sosial media seperti pernyataan Sri Mulyani(Ilona Estherina, Riri Rahayuningsih, 2025) dan Nasaruddin Umar(Tempo, 2025).

Di saat yang sama, harus diakui bahwa politisi menggunakan media dengan tidak bijak, sehingga kehilangan kesempatan dalam menggunakan media komunikasi yang krusial. Bahkan kegagalan dalam mengelola citra publik seseorang semakin dianggap sebagai indikator seorang politisi yang tidak kompeten. Faktanya, banyak politisi yang alih-alih membangun citra positif, melalui sosial medianya, mereka malah menggunakan untuk flexing (Iqbal, 2025), sehingga malah memperburuk citra pejabat di mata publik yang kebanyakan terhimpit masalah ekonomi dan besarnya kesenjangan sosial (Luhtakallio & Meriluoto, 2024). Ini misalnya terlihat pada acara yang diadakan atau barang branded yang digunakan menteri dan keluarganya. Salah satu yang sempat viral adalah uang segepok yang dipamerkan Zulkifli Hasan(Rahmawati, 2024).

Kelima, kurangnya kredibilitas politisi dan pejabat. Pemerintahan yang transparan tidak hanya diukur dari hasil kebijakannya, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan kebijakan tersebut secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami publik(Alessandro et al., 2021). Hal ini termasuk inkonsistensi pejabat antara pernyataan dan tindakan mereka. Salah satu yang dapat disorot dari sini adalah ambiguitas dari pernyataan Prabowo sendiri yang mendorong bawahannya untuk menerima kritik secara terbuka(Antara, 2025), namun pada kesempatan tertentu yang biasa terbatas, Prabowo malah membatasi media (Seknas Fitra, 2025)dan menyatakan bahwa ada informasi hoax yang disebarluaskan media(Tribrata, 2025). [Selain contoh tersebut, ada kasus](#)



di mana Menteri Desa dan Daerah Tertinggal menggunakan kop dan stempel kementerian untuk kegiatan pribadinya(Lubis, 2024).

Hal ini mengindikasikan adanya *trust gap* antara pemerintah dan masyarakat, yang salah satu penyebabnya adalah ketidakkonsistenan pesan antar pejabat publik. Apabila seorang politisi dipersepsikan sebagai tidak jujur, egois, atau tidak konsisten, imej mengenai mereka akan terpengaruh. Meskipun informasi atau pesan yang disampaikan oleh politisi tersebut sudah dirancang dengan baik, kemungkinan besar akan gagal karena audiens tidak memiliki kepercayaan terhadap sumbernya.

Berdasarkan analisis literatur dan data, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara komunikasi internal birokrasi dan komunikasi politik pemerintah tidak dapat dipisahkan. Efektivitas komunikasi organisasi di dalam pemerintahan secara langsung memengaruhi bagaimana kebijakan disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi politik adalah cermin dari komunikasi internal birokrasi. Ketika koordinasi antar kementerian lemah dan pesan kebijakan tidak konsisten, maka pesan publik yang diterima masyarakat juga menjadi kabur dan sering kali menimbulkan kebingungan.

Efektivitas komunikasi organisasi dan komunikasi politik dalam pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem formal, tetapi oleh sejauh mana sistem tersebut dihidupkan oleh kepemimpinan yang komunikatif. Kepemimpinan yang mampu mendengarkan, mengklarifikasi, dan membangun dialog lintas sektor menjadi katalis utama perubahan budaya birokrasi dari yang bersifat komando menjadi kolaboratif.

Implikasi kebijakan dari hasil ini adalah perlunya strategi komunikasi nasional yang berbasis data dan kepercayaan publik. Pemerintah perlu mengembangkan *National Strategic Communication Framework* yang berisi pedoman komunikasi antar kementerian, protokol krisis komunikasi, serta panduan etika komunikasi digital pejabat publik. Model ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Korea Selatan dan Singapura, di mana setiap kementerian memiliki *Communication Response Unit* yang terhubung langsung dengan kantor perdana menteri untuk menjaga konsistensi pesan.

Selain itu, peningkatan kapasitas pejabat publik dalam berkomunikasi juga menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan komunikasi strategis, manajemen media, dan literasi digital bagi pejabat eselon I dan II harus dijadikan bagian dari program reformasi birokrasi. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berbicara, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa komunikasi adalah bagian dari kinerja institusional.

Pada akhirnya, hasil analisis ini menegaskan bahwa komunikasi politik dan komunikasi organisasi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya saling menentukan dalam membangun kinerja pemerintahan yang efektif dan dipercaya publik. Pemerintahan Kabinet Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi model komunikasi pemerintahan yang adaptif dan modern, asalkan mampu memperkuat koordinasi internal, mempercepat digitalisasi komunikasi, dan membangun dialog publik yang terbuka serta berbasis kepercayaan.

Dengan demikian, satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dipahami sebagai fase transisi sekaligus fase pembelajaran institusional dalam membangun budaya komunikasi birokrasi yang kolaboratif, responsif, dan transparan. Jika perbaikan benar dilakukan, maka komunikasi organisasi dan komunikasi politik akan menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan kinerja pemerintahan Prabowo dan legitimasi demokratis di Indonesia.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

SIMPULAN (CONCLUSION)

Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi organisasi dan kepemimpinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam menentukan efektivitas kinerja pemerintahan. Dalam konteks satu tahun pertama Kabinet Merah Putih (Oktober 2024–Oktober 2025), hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan dalam mencapai stabilitas politik dan ekonomi tidak secara otomatis diikuti oleh efektivitas komunikasi lintas lembaga dan konsistensi komunikasi politik. Artinya, komunikasi masih menjadi titik kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komunikasi organisasi dalam pemerintahan berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan berbagai elemen birokrasi agar kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat di lapangan. Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan dalam bentuk hierarki yang kaku, ketidaksinkronan antar lembaga, dan kurangnya mekanisme komunikasi horizontal yang berfungsi secara efektif. Ketika pesan kebijakan ditransmisikan hanya melalui jalur vertikal tanpa ruang bagi umpan balik, maka makna pesan tersebut berpotensi mengalami distorsi. Fenomena ini terlihat jelas pada kasus koordinasi kebijakan pangan dan energi yang sempat menimbulkan kebingungan publik akibat perbedaan pernyataan antar kementerian.

Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan hierarkis serta gaya komunikasi Wakil Presiden Gibran yang terbuka dan berbasis digital menampilkan dua wajah komunikasi pemerintahan modern Indonesia: disiplin birokrasi dan partisipasi publik. Keduanya memiliki potensi besar apabila dapat diintegrasikan dalam sistem komunikasi pemerintahan yang adaptif. Namun tanpa desain komunikasi organisasi yang jelas dan sistem koordinasi digital yang terintegrasi, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Dengan demikian, reformasi komunikasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur digital, tetapi juga harus disertai dengan transformasi budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang mendorong keterbukaan serta kolaborasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas komunikasi pemerintahan sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga dan kapasitas pejabat publik dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, perlu dirancang program peningkatan kapasitas komunikasi strategis bagi pimpinan kementerian dan pejabat eselon I-II agar mereka mampu menjadi *communication leaders* di lingkungan birokrasi masing-masing. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan berbicara di depan publik, tetapi juga pada kemampuan membangun pesan kebijakan yang terukur, berbasis data, dan komunikatif di ruang media digital.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang komunikasi organisasi di sektor publik dengan menekankan pentingnya integrasi antara komunikasi internal, kepemimpinan, dan komunikasi eksternal (publik). Ketiganya membentuk sistem komunikasi pemerintahan yang ideal — sebuah sistem yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan politik masyarakat.

Dari sisi praktis, kajian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola komunikasi (*communication governance*) melalui tiga langkah utama: pertama, membangun mekanisme komunikasi lintas kementerian yang terkoordinasi dan berbasis data; kedua, memperkuat pelatihan kepemimpinan komunikatif di seluruh level



birokrasi; dan ketiga, memperluas fungsi komunikasi politik menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintahan Indonesia berpeluang besar untuk membangun budaya komunikasi birokrasi yang kolaboratif, partisipatif, dan transparan. Komunikasi tidak lagi dilihat hanya sebagai instrumen penyampaian kebijakan, tetapi sebagai fondasi strategis bagi efektivitas kinerja pemerintahan dan penguatan legitimasi demokratis. Kajian ini pada akhirnya menegaskan bahwa pemerintahan yang komunikatif adalah pemerintahan yang mampu mengelola makna, bukan sekadar mengendalikan pesan dan pada titik inilah komunikasi menjadi kekuatan transformatif bagi kemajuan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Addawiyah Addawiyah, Lolita Febrian, & Nurul Fadillah. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i1.4438>
- Alessandro, M., Cardinale Lagomarsino, B., Scartascini, C., Streb, J., & Torrealday, J. (2021). Transparency and trust in government evidence from a survey experiment. *World Development*, 138. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105223>
- Amadasun, P. (2014). Application of organisational homeostasis as an emerging paradigm for knowledge management. *International Journal of Knowledge-Based Development*, 5(1), 32–49. <https://doi.org/10.1504/IJKBD.2014.059800>
- Anindita, C., Rabani, C., Rizkia, R. R., Eka, W., Arianto, M. A., & Artikel, I. (2025). Menggali Konsep Demokrasi Santun: Tinjauan Literatur dalam Konteks Kepemimpinan Prabowo Subianto. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 521–525. <https://doi.org/10.21009/JIMD.V24I2.53126>
- Antara. (2025). *Prabowo urges ministries, institutions to embrace public criticism - ANTARA News*. https://en.antaranews.com/news/377081/prabowo-urges-ministries-institutions-to-embrace-public-criticism?utm_source=chatgpt.com
- Ariel, Y., & Elishar, V. (2025). Political Communication and the Hype Cycle: Tracing Its Evolution Across the Digital Era. *Journalism and Media*, 6(2). <https://doi.org/10.3390/journalmedia6020087>
- Aulia, D. D. (2025). *Bamsoet Ingatkan Pentingnya Komunikasi Publik yang Baik bagi Pejabat Negara*. Newsdetik.
- Bali, A., & Halpin, D. (2021). Agenda-setting instruments: means and strategies for the management of policy demands. *Policy and Society*, 40(3), 333–344. <https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1955489>
- BPMI Setpres. (2024). *Retreat Kabinet Merah Putih: Bangun Sinergi dan Disiplin di Akmil Magelang*. Biro Pers, Media, Dan Informasi Sekretariat Presiden.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

Celios. (2025). *Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran*. Celios.

CNN Indonesia. (2025). *Menkes Budi: Penyakit Cacingan Tidak Sebabkan Kematian*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250824112507-255-1265752/menkes-budi-penyakit-cacingan-tidak-sebabkan-kematian>

Detik. (2025). *Potret Kepuasan Prabowo-Gibran di Setahun Pemerintahan dalam Survei*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-8168666/potret-kepuasan-prabowo-gibran-di-setahun-pemerintahan-dalam-survei?page=4>

Diqqi, M., Anwar, M., Tinggi, S., Komunikasi, I., Fitria Nur ', S., Sekolah, A., Ilmu, T., & Semarang, K. (2025). Analisis Retorika Politik dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 Tahun 2025. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(5), 415–428. <https://doi.org/10.61722/JMIA.V2I5.6637>

Dubois, E., & Blank, G. (2018). *Information, Communication & Society The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media*. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1428656>

Ferdiansyah, A. N., & Aini, Z. (2025). Peran Komunikasi Organisasi dan Kepemimpinan dalam Mendorong Transformasi Digital di Indonesia: Transformasi. *Prosiding Seminar Nasional*

Grunig, J., ... L. G. public relations and communication, & 2013, undefined. (2013). Models of public relations and communication. *Api.Taylorfrancis.Com*, 117–157. <https://doi.org/10.4324/9780203812303-14>

Hakim, I. A. (2025). *Soal Paket Kepala Babi di Kantor Tempo, Jubir Presiden Hasan Nasbi Tanggapi Begini*. Kompas.Com. <https://www.kompas.tv/nasional/582206/soal-paket-kepala-babi-di-kantor-tempo-jubir-presiden-hasan-nasbi-tanggapi-begini>

Hatala, J. P., & Lutta, J. G. (2009). Managing information sharing within an organizational setting: A social network perspective. In *Performance Improvement Quarterly* (Vol. 21, Issue 4, pp. 5–33). <https://doi.org/10.1002/piq.20036>

Hunneman, T. (2025). *Strategi kepemimpinan Prabowo yang kuat wujudkan kesejahteraan rakyat - ANTARA News*. Antaranews.

Ilona Estherina, Riri Rahayuningsih, dan A. A. H. (2025). *Pernyataan Kontroversial Sri Mulyani, soal Gaji Guru hingga Pajak Setara Zakat | tempo.co*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/pernyataan-kontroversial-sri-mulyani-soal-gaji-guru-hingga-pajak-setara-zakat-2059242>

Iqbal, M. (2025). *Perilaku Flexing Pejabat Publik dan Publik Figur Hubungannya Trauma Kemiskinan*. Sindonews. https://nasional.sindonews.com/read/1620735/18/perilaku-flexing-pejabat-publik-dan-publik-figur-hubungannya-trauma-kemiskinan-1757995782?utm_source=chatgpt.com

Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. <http://www.obor.or.id>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

KemenpanRB. (2021). *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Perkuat SPBE Melalui Kolaborasi Satu Data Indonesia*.

Khan, I. U., Amin, R. U., & Saif, N. (2022). The contributions of inspirational motivation and intellectual stimulation in connecting individualized consideration and idealized influence. *International Journal of Leadership in Education*.
<https://doi.org/10.1080/13603124.2022.2076286>;SUBPAGE:STRING:ACCESS

König, P. D. (2021). A magic bullet in policy communication? On the ambiguous use of framing in policy research. *Policy Studies*, 42(1), 60–79.
<https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1581153>

Kusuma, E. T., Ningsih, M., Ip, S., Kom Rakhmad, M. I., Ramadhani, S., Sos, S., & Kom, M. I. (2024). GAYA KOMUNIKASI KOMANDO PRESIDEN JOKOWI DALAM KONFRENSI PERS DI YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN. *PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 1–6.
<https://doi.org/10.36815/PAWITRAKOMUNIKA.V5I2.3386>

Lubis, R. E. L. (2024). *Sederet kontroversi menteri-menteri dan pembantu Prabowo – Mulai dari pelanggaran HAM berat, kop surat dan anggaran Rp20 T*. BBC News Indonesia.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5yxdwv440wo>

Luhtakallio, E., & Meriluoto, T. (2024). Fame democracy? Social media and visuality-based transformation of the public sphere. *Distinktion*, 25(3), 318–342.
<https://doi.org/10.1080/1600910X.2023.2263818>

Maitlis, S., & Christianson, M. (2014). Sensemaking in Organizations: Taking Stock and Moving Forward. *Academy of Management Annals*, 8(1), 57–125.
<https://doi.org/10.5465/19416520.2014.873177>

Maulana, M. L., & Harjono, B. (2024). POLITIK DAN AI: GAYA KOMUNIKASI KAMPANYE POLITIK CAPRES PRABOWO GIBRAN. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(2), 159–169.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=POLITIK+DAN+AI%3A+GAYA+KOMUNIKASI+KAMPANYE+POLITIK+CAPRES+PRABOWOGIBRAN&btnG=

McKenna, B., and, P. G.-J. of technical writing, & 2000, undefined. (2000). Technocratic discourse: A primer. *Journals.Sagepub.Com* BJ McKenna, P Graham *Journal of Technical Writing and Communication*, 2000•journals.Sagepub.Com, 30(3), 223–251.
<https://doi.org/10.2190/56FY-V5TH-2U3U-MHQK>

Media Indonesia. (2025). *Silang Kata para Menteri Bebani Prabowo*.

Meffert, M. F., Chung, S., Joiner, A. J., Waks, L., & Garst, J. (2006). The effects of negativity and motivated information processing during a political campaign. *Journal of Communication*, 56(1), 27–51. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00003.x>

Mudjiyanto, B., Tawaang, F., Nugroho, A. C., Lusianawati, H., & Launa. (2022). Disonansi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

Kognitif Elite Politik dan Pejabat Publik Dalam Menghadapi Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng. *Journal of Political Communication and Media*, 1(1), 1–23.

Muhamad, Wendorf, Jessica, Harrison, Tyler R., & Yang, F. (2019). Organizational communication: Theory and practice. In *An integrated approach to communication theory and research*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203710753-30/ORGANIZATIONAL-COMMUNICATION-JESSICA-WENDORF-MUHAMAD-TYLER-HARRISON-FAN-YANG>

Nurachmah, S. (2022). Terdapat Noise Komunikasi di Setiap Step Proses Transfer. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 2576–2581.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Terdapat+Noise+Komunikasi+di+Setiap+Step+Proses+Transfer+Komunikasi+pada+Pesan+di+Media+Internet&btnG=

Poltracking. (2025). *Rilis Temuan Survei Nasional Tatap Muka Poltracking Indonesia: EVALUASI 1 TAHUN KINERJA PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN – Poltracking*. Poltracking.

Rahmawati, Y. (2024). *Seberapa Kaya Zulkifli Hasan? Konten Flexing-nya Curi Perhatian*. Suara. <https://www.suara.com/lifestyle/2024/09/28/181606/seberapa-kaya-zulkifli-hasan-konten-flexing-nya-curi-perhatian>

Rifandi, A. (2025). *Badan Bahasa ingatkan pejabat publik kuasai etika bertutur* - ANTARA News. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/5078917/badan-bahasa-ingatkan-pejabat-publik-kuasai-etika-bertutur>

Riyadi, I. (2025). The Influence of Prabowo's Leadership Communication on Red and White Cabinet. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 4(3), 130–140.
<https://doi.org/10.55885/jprsp.v4i3.515>

Rizqi Nandadita Pamungkas, Permadi, D., & Florina, I. D. (2024). Strategi Humor Gibran Rakabuming dalam Komunikasi Politik di Media Sosial X (Twitter). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 175–182. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4057>

Rodrigues, J. G. (2023). Publicity, Transparency, and Openness in Public Administration. *Revista de Derecho Uninorte*, 58, 9–37. <https://doi.org/10.14482/dere.58.004.223>

Rohillah, I., & Sulistiana, I. S. (2025). KOMUNIKASI KELOMPOK DAN ORGANISASI. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 193–204.
<https://doi.org/10.71282/JURMIE.V2I6.427>

Safitri, E. (2025). Skor Setahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Versi IndoStrategi. *Detiknews*.

Seknas Fitra. (2025). *Prabowo Larang Media Liput Town Hall Danantara, Transparansi Dipertanyakan*. <https://seknasfitra.org/prabowo-larang-media-liput-town-hall-danantara-transparansi-dipertanyakan/>

Sendika, M., & Frinaldi, A. (2025). TRANSFORMASI BUDAYA ORGANISASI DI



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

SEKTOR PUBLIK: INOVASI MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF. *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 371–380.
<https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5376>

Sudoyo, W. (2025). *Satu Tahun Prabowo-Gibran: Kemkomdigi Percepat Transformasi Digital Menuju Layanan Publik Modern*. Indonesia.Go.Id.

Sugiarto. (2025). *Komunikasi kebijakan publik di era post truth*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Suryana, T. F., Rahmawati, A. A., Ramdanti, N. S., & Safitri, A. N. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 37–53.

Syechhubakr, A. S. (2025). *Prabowo's inner circle is dominated by young, groupthink-prone loyalists. What could go wrong?* Indonesia At Melbourne.
<https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/prabowos-inner-circle-is-dominated-by-young-groupthink-prone-loyalists-what-could-go-wrong/>

Tempo. (2025). *Pernyataan Lengkap Menteri Agama soal Guru Jangan Cari Uang seperti Pedagang*. <https://www.tempo.co/ekonomi/pernyataan-lengkap-menteri-agama-soal-guru-jangan-cari-uang-seperti-pedagang-2066428>

Toha, L. I. (2024). Komunikasi Politik Kampanye Pemilu di Indonesia 2024. *Jurnal Lingue: Bahasa, Budaya Dan Sastra*, 6(2), 49–61.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=KOMUNIKASI+POLITI+K+KAMPANYE+PEMILU+DI+INDONESIA2024PERSPEKTIF+FILSAFAT+BAHAS+A+ANTONIO+GRAMSCI&btnG=

Tribrata. (2025). *Presiden Prabowo Minta Wartawan Waspadai Hoaks yang Bisa Mem.* https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/presiden-prabowo-minta-wartawan-waspadai-hoaks-yang-bisa-memecah-persatuan-83944?utm_source=chatgpt.com

Tumanggor, T., & Kholid, S. (2025). Reformasi Sistem Komunikasi Organisasi Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1381–1391.
<https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1427>

Umam, A. H., & Harijono, K. A. (2025). Praktik Translingual dalam Komunikasi Politik Prabowo: Identitas dan Ideologi dalam Diskursus Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Dialogis*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47970/JKD.V1I1.954>

Wahyuanto, E. (2025). *Badan Komunikasi Pemerintah: Membangun komunikasi lebih responsif*. Antaranews.

Yudi, A. L. (2025). *Penyebab Perbedaan Data Simpanan Pemerintah Daerah yang Mengendap di Bank*. Tempo.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-